LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

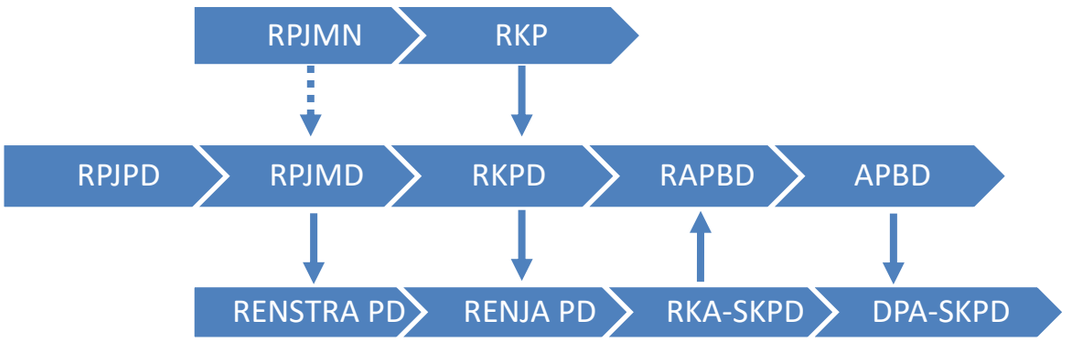
Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Keterangan:

- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang perubahan atas perbub nomor 19 tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan,indicator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintah tahun 2024;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 ; dan
d. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II tahun berkenaan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dan RPJMD Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 TB II

(Target renstra perangkat daerah kabupaten nganjuk tahun 2024 – 2026)

Kode rekening					Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)/sub kegiatan (sub output)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)						Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
							Target Kinerja capaian program (renstra perangkat daerah 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)	Target Renja perangkat daerah tahun (2024)	Realisasi renja perangkat daerah tahun (2024)	Tingkat realisasi (%) tahun (2024)	Target program dan kegiatan (renja perangpkat daerah) tahun 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	5	0	1		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	85	170	101	53	52%	85	223	362%

					DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	05	01	2.01		Peencaanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16	9	1		400%	16	13	181%
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaan Perangkat Daerah	6	3	0	4	0%	6	12	200%
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1	1	0	0	0%	1	2	200%
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1	1	0	0	0%	1	2	200%

1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	0	0	0%	1	2	200%
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	0	0	0%	1	2	200%
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danikhtisar realiasasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	0	0%	1	2	200%

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1	0	1	0%	2	4	200%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		73	21	58	8	14%	73	102	140%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	14	53	7	13%	53	74	140%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	0	0	0%	2	3	150%
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/ Semesteran SKPD dan	18	6	5	1	20%	18	25	139%

					semester SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
0 5	0 1	2. 0 5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0 5	0 1	2. 0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0 5	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		199	84	28	32	114%	199	315	158%
1	0 5	0 1	2. 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	4	12	4	1	25%	4	17	425%

1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	12	3	1	33%	3	16	533%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	12	0	1	0%	3	16	533%
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5	12	1	1	100%	5	18	360%
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	12	8	0	0%	36	48	133%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108	12	8	29	363%	108	149	138%
1	0	0	2.	1	Penatausahaan	Jumlah Dokumen	7	12	4	1	25%	7	20	286%

	5	1	0 6	0	Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
1	0 5	0 1	2. 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5	5	0	0	0%	5	10	200%
1	0 5	0 1	2. 0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0 5	0 1	2. 0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1	5	0	0	0%	1	6	600%
1	0 5	0 1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7	36	5	4	0%	7	47	671%
1	0 5	0 1	2. 0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	1	1	100%	1	14	1400%
1	0	0	2. 0		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	3	12	2	3	150%	3	18	600%

	5	1	0 8	2	Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air Listrik yang disediakan								
1	0 5	0 1	2. 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2	12	2	0	0%	2	14	700%
1	0 5	0 1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		45	36	9	4	44%	45	85	189%
1	0 5	0 1	2. 0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan Pajaknya.	1	12	1	1	100%	1	14	1400%
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	36	12	6	3	50%	36	51	142%

	5	1	0 9	2	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
1	0 5	0 1	2. 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di dipelihara	2	12	2	0	0%	2	14	700%
1	0 5	0 2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		85%	84	*56*	1.648	2943%	85%	1733	203865 %
1	0 5	0 2	2. 0 1		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah		85%	36	40	1.647	4118%	85%	1684	198100 %

					Kabupaten/Kota								
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melalaui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawal pengawalan	56	12	13	11	85%	56	79	141%
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan	118	12	27	25	93%	118	155	131%

					Penangan Unjukrasa dan Kerusuhan Massa	massaKetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masya rakat Tingkat/ kabupaten /Kota								
01	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan	3	12	1	0	0%	3	15	500%
01	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	20	12	1	10	1000%	20	42	210%
01	05	02	2.05	05	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan	0	0	0	0	0%	0	0	0%

			1		Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum							
01	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga danKemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil kerjasama antarLembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	11	12	2.847	1601	56%	11	1624	14764%
01	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman	11	1	0	0	0%	11	12	109%

					Masyarakat	Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan								
01	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	2	12	0	0	0%	2	14	700%
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		76	36	14	10		76	122	339%
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat Pelaku Usaha	5	12	3	0	0%	5	17	142%

1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	46	12	6	9	150%	46	67	558%
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat dditangani sesuai SOP	25	12	5	1	20%	25	38	317%
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		3	12	2	0	0%	3	15	125%

1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	12	2	0	0%	4	16	133%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut **:**

Tabel 2.1.2

Katagori Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Smber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Resrtra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisa factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Restra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana table berikut

Tabel 2.1.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Pridikat**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	52 %	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap target Restra PD	Kebijakan yang diambil

Ada beberapa sub Kegiatan yang telah dijadwalkan pada TW I, namun belum dapat terealisasi sampai dengan TW II		Akan segera dilaksanakan penyerapan sesuai di Tribulan berikutnya

Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48 %	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap target Restra PD	Kebijakan yang diambil
Pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota ada Penambahan DBHC HT yang masuk pada akhir TW satu sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan pada TW 1 dan akan dilaksanakan pada TW berikutnya		Kegiatan akan dilaksanakan pada Tribulan II

Sumber :Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capain kinerja pelayanan Perangkat daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tatun 2018 tetang Standart Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Bisnis Utama (core Bussiness) dan indicator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .

Tabel 2.2.1

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026			Realisasi Capaian			Pro yeksi	Capaian Analisis
					Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2024 (s/d TW 2)	Thn 2025	Thn 2026		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Penegakan Perda										
			Meningkatnya	Persentase	85	95	100	-		-		

			penanganan gangguan trantibum	Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani								
			Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	85	95	100	-		-		

Sumber Laporan Capaian Kinerja TB II 2024

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2005-2025, sebagai ukuran tercapainya NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA Satuan Polisi Pamong Praja masuk pada sasaran ke 5 : " Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman, tentram,tertib dan damai . Dengan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kriminalitas dalam aspek kehidupan masyarakat
2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik social yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan social ekonomi
3. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban, keamanan, bela bangsa dan Negara
4. Terbinanya semangat /jiwa nasionalisme, patriotism, serta persatuan dan kesatuan pada pribadi dan semua aspek kehidupan bermasyarakat
5. Terwujudnya rasa aman masyarakat dalam melaksanakan semua aktifitasnya.

Sedangkan dalam Praturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standard Pelayanan minimal untuk Standar Teknis mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagaimana Tabel SPM berikut ini :

STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2023

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal							Keterangan
			Indikator	Komponen				Rumus	Tolak ukur capaian	Target	
1	2	3	4	5				6	7	8	9
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Pemenuhan Standar Operasional berdasarkan peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan	SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada				Ada atau Tidak SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada	Ada	Ada	
	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Pemenuhan Kendaraan Operasional	Kendaraan Dalmas	A	Jumlah Kendaraan Dalmas yang ada	0	X 100%	Tersedianya Kendaraan Dalmas	%	0 %	- Satu regu berjumlah 10 anggota dan 1 komandan
				B	Jumlah Regu	5					

					Dalmas						regu
			Kendaraan patroli	A	Jumlah kendaraan patrol yang ada	4	X 100%	Tersedianya Kendaraan Patroli	80 %	-	- Kendaraan Jenis offroad/ jeep,double cabin, minibus - Roda dua
				B	Jumlah regu	5					
			Kendaraan angkut		Pengadaan kendaraan angkut dapat dilakukan dengan melihat banyaknya jumlah penertiban / pelanggaran peraturan daerah/ peraturan Kepala	Ada atau Tidak		Tersedianya Kendaraan Angkut	Belum	-	- Kendaraan jenis truk - Dipergunakan untuk mengangkut pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), Pekerja

				Daerah.						Seks Komersial (PSK), serta Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Hasil-Hasil Penertiban lainnya
		Pemenuhan Perlengkapan operasional	Perlengkapan perorangan	A	Jumlah Perlengkapan perorangan yang ada	0	X 100%	Tersedianya Perlengkapan perorangan	0%	(Perlengkapan perorangan per paket terdiri) a. tonfa dan holster tonfa; b. borgol; c. tameng; d. senter; e ferplas;
				B	Jumlah Anggota Pol PP yang tergabung dalam regu	35				

											f. tas atau ransel; g.*sleeping bag*; h. jaket; i. rompi/*body protector*; j. masker.
			Perlengkapan beregu		Jumlah Perlengkapan Beregu yang dimiliki		Ada atau Tidak	Tersedianya Perlengkapan Beregu			Perlengkapan Beregu terdiri dari Perlengkapan Perorangan di tambah dengan matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan

									dan peralatan komunikasi
			Perlengkapan Patroli	Perlengkapan Patroli yang dimiliki	Ada atau Tidak	Tersedianya Perlengkapan Patroli	Belum		Perlengkapan patroli terdiri dari Kendaraan patroli, Perlengkapan Perorangan, ditambah Peralatan Komunikasi.
			Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada	Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada yang dimiliki	Ada atau Tidak	Tersedianya Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada	Belum		Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas

										perlengkapan peroranga n, peralatan komunika si, dan perlengkapan penegakan Perda yustisial.
3	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindunga	Pemenuhan Standar Kualitas Anggota Satpol PP	Persentase Pejabat Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar	A	Jumlah Pejabat Pol PP yang memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar	1	x100 %		1 %	
				B	Jumlah Pejabat Pol PP	10	x 100 %		1 %	

	n masyarakat		Persentase Pejabat Fungsional Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	A	Jumlah Pejabat Pol PP yang memiliki Sertifikat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0	x100 %	0 %	0 %		
				B	Jumlah Pejabat Pol PP	10					
			Persentase **Pejabat PPNS Pol PP** yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	A	Jumlah Pejabat PPNS Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0	x100 %	0 %	0 %		
				B	Jumlah Pejabat PPNS Pol PP	0					
4	**Standar**	**Pelayanan**	**Persentase**	**A**	**Jumlah**	**100**	**x100**	**100 %**	**100 %**	-	- Biaya 2,5 %

	Pelayanan Masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	**Kerugian Material**	**Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan kerugian materil akibat dari dari penegakan hukum Perda dan Perkada.**		**masyarakat memperoleh layanan kerugian materil**		**%**				dari operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan - Berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan
				B	**Jumlah keseluruhan masyarakat yang seharusnya memperoleh layanan kerugian materil**	**100**					
		Pelayanan Pengobatan	**Persentase Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan**	**A**	**Jumlah masyarakat memperoleh layanan pengobatan**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100 % 100 %**		

			pengobatan yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada				**100 %**	**100 %**			Perkada - tindakan pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan ditindaklan juti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat
				B	**Jumlah keseluruhan masyarakat yang seharusnya memperoleh layanan pengobatan**	**100**					

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan / atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah,penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitiandan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di sajikan dalam table berikut :

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah " Meningkatnya Ketentramn dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda "adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya penangan gangguan Trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani " dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Prosentase meningkatnya ketentraman dan Penegakan Perda	Meningkatnya penangan gangguan trantibum	Prosentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	85 %
		Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Prosentase pelanggaran Perda yang tertangani	85 %

Sumber Restra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.2. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. NGANJUK TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**12.203.958.068,00**	**12.951.834.818,00**	**14.733.190.818,00**	**2.529.232.750,00**							**12.331.218.624,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.203.958.068,00**	**12.951.834.818,00**	**14.733.190.818,00**	**2.529.232.750,00**							**12.331.218.624,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**12.203.958.068,00**	**12.951.834.818,00**	**14.733.190.818,00**	**2.529.232.750,00**							**12.331.218.624,00**	
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja**				**85 Nilai**	**85 Nilai**	**8.133.186.318,00**	**8.681.063.318,00**	**8.941.959.318,00**	**98.372.056,00**							**8.231.558.374,00**	

	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu*				16 dokumen	16 dokumen	39.347.750,00	41.871.050,00	41.871.050,00	2.523.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana	Satuan Polisi Pamong Praja		39.307.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.808.700,00	5.808.700,00	5.808.700,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			5.808.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	7.728.050,00	7.728.050,00	7.728.050,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			7.728.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	6.472.550,00	6.472.550,00	6.472.550,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiba			6.472.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			Perubahan RKA-SKPD												n dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.215.600,00	3.215.600,00	3.215.600,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningk			3.176.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																atkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.934.550,00	2.934.550,00	2.934.550,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman,			2.934.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.294.200,00	9.817.500,00	9.817.500,00	2.523.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			7.294.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.894.100,00	5.894.100,00	5.894.100,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			5.894.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan yang disusun secara tepat waktu*				73 dokumen	73 dokumen	6.435.245.400,00	7.109.426.000,00	7.368.314.000,00	933.068.600,00			-	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana	Satuan Polisi Pamong Praja		7.101.945.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6.423.721.100,00	7.090.425.000,00	7.357.111.000,00	933.389.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			7.090.425.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.916.500,00	5.633.000,00	5.633.000,00	283.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			5.913.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				18 Laporan	18 Laporan	5.607.800,00	13.368.000,00	5.570.000,00	-37.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiba			5.607.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												n dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas*				86 Pegawai	86 Pegawai	110.826.900,00	0,00	0,00	-110.826.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas	Satuan Polisi Pamong Praja		51.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																keaman an, ketentra man, ketertiba n dan kerukun an serta kesiapsi agaan mengha dapi bencana				
	1.05.0 1.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				86 Paket	86 Paket	110.826.900,00	0,00	0,00	-110.826.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keaman an, ketentra man, ketertiba n dan kerukun an serta kesiapsi agaan mengha dapi bencana Meningkatkan stabilitas keaman an, ketentra man, ketertiba n dan kerukun an serta kesiapsi			51.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																agaan mengha dapi bencana				
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia*				199 Paket/ Dokumen /L aporan	199 Paket/ Dokumen /L aporan	614.535.168,00	614.535.168,00	632.574.068,00	18.038.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan mengha dapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan mengha dapi bencana	Satuan Polisi Pamong Praja		305.160.874,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi				3 Paket	3 Paket	8.037.968,00	8.037.968,00	8.037.968,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua	DANA TRANSFER UMUM-	Memperkuat Stabilitas	Meningkatkan stabilita			8.041.524,00	SATUAN POLISI

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	s keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	93.843.000,00	93.843.000,00	104.564.900,00	10.721.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta			81.444.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.076.200,00	9.076.200,00	9.936.200,00	860.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas			8.279.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																keaman an, ketentra man, ketertiba n dan kerukun an serta kesiapsi agaan mengha dapi bencana				
	1.05.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keaman an, ketentra man, ketertiba n dan kerukun an serta kesiapsi agaan mengha dapi bencana Meningkatkan stabilitas keaman an, ketentra man, ketertiba n dan			8.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	25 Laporan	23.370.000,00	23.370.000,00	22.370.000,00	-1.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan			17.875.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				226 Laporan	226 Laporan	470.798.000,00	470.798.000,00	476.023.000,00	5.225.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan			174.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3000 Dokumen	3000 Dokumen	7.010.000,00	7.010.000,00	9.242.000,00	2.232.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			7.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*				5 jenis	5 jenis	78.272.000,00	78.272.000,00	91.462.000,00	13.190.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana	Satuan Polisi Pamong Praja		20.647.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	78.272.000,00	78.272.000,00	91.462.000,00	13.190.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			20.647.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu*				7 laporan	7 laporan	221.372.000,00	203.372.000,00	219.372.000,00	-2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana	Satuan Polisi Pamong Praja		168.924.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiba			2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																n dan kerukunan serta kesiapsiagaan mengha dapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan mengha dapi bencana				
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	112.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan mengha dapi bencana Meningk			112.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																atkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	106.372.000,00	106.372.000,00	122.372.000,00	16.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan			54.924.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana				
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik*				45 jenis	45 jenis	633.587.100,00	633.587.100,00	588.366.200,00	-45.220.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana	Satuan Polisi Pamong Praja		544.542.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	115.087.300,00	115.087.300,00	69.866.400,00	45.220.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			115.094.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	442.202.100,00	442.202.100,00	442.202.100,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			367.474.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	76.297.700,00	76.297.700,00	76.297.700,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			61.973.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**				**85 %**	**85 %**	**4.070.771.750,00**	**4.270.771.500,00**	**5.791.231.500,00**	**28.888.500,00**							**4.099.660.250,00**	

	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani*				10847 kasus	10847 kasus	3.984.598.650,00	4.184.598.400,00	4.203.168.400,00	218.569.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Nganjuk		3.995.008.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	10.899.000,00	10.899.000,00	10.899.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			11.455.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																	

			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20Dokumen	20Dokumen	1.974.797.750,00	1.974.797.750,00	1.974.797.750,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			1.984.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																	

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				10545 Dokumen	10545 Dokumen	1.121.055.250,00	1.321.055.000,00	1.321.055.000,00	199.999.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			1.127.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	

			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				11 Dokumen	11 Dokumen	2.133.900,00	2.133.900,00	2.133.900,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			2.134.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																	

			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				56 laporan	56 laporan	837.553.900,00	837.553.900,00	850.843.900,00	13.290.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			824.054.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	

			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				118 Laporan	118 Laporan	35.658.850,00	35.658.850,00	40.938.850,00	5.280.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			43.164.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani*				76 laporan	76 laporan	84.943.100,00	84.943.100,00	1.586.833.100,00	1.501.890.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Nganjuk		103.012.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.245.100,00	3.245.100,00	606.497.900,00	603.252.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			4.773.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				25 Laporan	25 Laporan	31.565.500,00	31.565.500,00	930.202.700,00	898.637.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			42.546.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				46 Laporan	46 Laporan	50.132.500,00	50.132.500,00	50.132.500,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			55.692.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*				4 laporan	4 laporan	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Nganjuk		1.640.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																	

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana			1.640.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**12.203.958.068,00**	**12.951.834.818,00**	**14.733.190.818,00**	**2.529.232.750,00**							**12.331.218.624,00**	

PROGRAM/KEG/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
	12.951.834.818,00	**14.733.180.818,00**	**1.781.346.000,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.681.063.318,00**	**8.941.959.318,00**	**260.896.000,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**41.871.050,00**	**41.871.050,00**		
Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.808.700,00	5.808.700,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	7.728.050,00	7.728.050,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	6.472.550,00	6.472.550,00		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.215.600,00	3.215.600,00		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.934.550,00	2.934.550,00		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.817.500,00	9.817.500,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.894.100,00	5.894.100,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.109.426.000,00**	**7.368.314.000,00**	**258.888.000,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.090.425.000,00	7.357.111.000,00	266.686.000,00	Ditahun 2024 anggaran Gaji 13 dan THR dianggarkan 50% , selanjutnya ada perubahan untuk gaji dan THR menjadi 100 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.633.000,00	5.633.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.368.000,00	5.570.000,00	7.798.000,00	Pergeseran Anggaran Untuk Penambahan Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor (Bantras Anggota Korsik)

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**614.535.168,00**	**632.574.068**	**18.038.900,00**	
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.037.968,00	8.037.968,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.843.000,00	104.564.900,00	10.721.900,00	Pergeseran Anggaran dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	9.076.200,00	9.936.200,00	860.000,00	Pergeseran Anggaran dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00		
Fasilitas Kunjungan Tamu	23.370.000,00	22.370.000,00	(1.000.000)	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	470.798.000,00	476.023.000,00	5.225.000,00	Pergeseran Anggaran dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.010.000,00	9.242.000,00	2.232.000,00	Pergeseran Anggaran dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**78.272.000,00**	**91.462.000,00**	**13.190.000,00**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.272.000,00	91.462.000,00	13.190.000,00	Pergeseran Anggaran dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**203.372.000,00**	**219.372.000,00**	**16.000.000,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00		
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	94.000.000,00	94.000.000,00		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.372.000,00	122.372.000,00	16.000.000,00	Pergeseran Anggaran dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**633.587.100,00**	**588.366.200,00**	**45.220.900,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.087.300,00	69.866.400,00	(45.220.900,00)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	442.202.100,00	442.202.100,00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.297.700,00	76.297.700,00		

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**4.270.771.500,00**	**5.791.231.500,00**	**1.520.460.000,00**	
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	**4.184.598.400,00**	**4.203.168.400,00**	**18.570.000,00**	Penambahan HR Nataru dan Makan Minum Unras
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10.899.000,00	10.899.000,00		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.974.797.750,00	1.974.797.750,00		

Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.321.055.000,00	1.321.055.000,00		
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.133.900,00	2.133.900,00		
Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	837.553.900,00	850.843.900,00	13.290.000,00	Honorarium Nataru

Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	35.658.850,00	40.938.850,00	5.280.000,00	Makan Minum Unras
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	2.500.000,00	2.500.000,00		
Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**84.943.100,00**	**1.586.833.100,00**	**1.501.890.000,00**	
Sosialiasasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.245.100,00	606.497.900,00	603.252.800,00	DBHC HT
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	31.565.500,00	930.202.700,00	898.637.200,00	DBHC HT

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.132.500,00	50.132.500,00		
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**		
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.230.000,00	1.230.000,00		

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan Penambahan Anggaran sebesar Rp. 12.780.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana table berikut :

KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.05.02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
1.05.02.2.01.0015			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	837.553.900,-	844.753.900,-	Penambahan Bantras, kegiatan lebih dari 8 jam NATARU 2024 dari Rp. 75.000,- menjadi Rp. 100.000,- Dasar Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk

						Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk
1.05.02.2.01.0016			Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Peneriban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35.658.850,-	40.938.850,-	Penambahan Makan minum kegiatan Unjuk rasa dan kerusuhan massa. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 20 Dasar Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Unit kerja pada perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah , untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
   c. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan

3. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, singkronisasi, sinergitas, hormonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Nganjuk, Agustus 2024

PJ. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNO ,SSTP

PERUBAHAN RENJA 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN NGANJUK